

## **PERAN PENDUKUNG KEBIJAKAN ATAU REGULASI INOVASI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

### ***THE SUPPORTING ROLE OF REGIONAL INNOVATION POLICY OR REGULATION IN JEMBER DISTRICT***

**Frisilia Vita Anggraeni<sup>1</sup>, Sisilya Febbyanti<sup>2</sup>, Firra Septianti Ananditya<sup>3</sup>,  
Yelli Wulandari<sup>4</sup>, Rika Asti Aulina<sup>5</sup>, Akbar Maulana<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Muhammdiyah Jember  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Ilmu Pemerintahan

e-mail: [frisciliaa9@gmail.com](mailto:frisciliaa9@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Kebijakan dan regulasi yang tepat diperlukan untuk mendukung inovasi daerah, yang merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan. Inovasi yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat dicapai melalui pengaruh kebijakan di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan daerah membantu dan mendorong inovasi di Kabupaten Jember, dengan penekanan khusus pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan teknologi. Seperti contoh yaitu penerapan kebijakan berbasis teknologi yaitu *smart city* yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Jember. Metode tinjauan kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mencakup literatur dan kebijakan terkait inovasi daerah, serta studi kasus tentang implementasi kebijakan di Jember. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Jember sangat memengaruhi keberhasilan inisiatif kreatif, terutama dalam hal meningkatkan kapasitas lokal dan menciptakan peluang ekonomi yang didasarkan pada kearifan lokal. Rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran kebijakan termasuk koordinasi antar-institusi dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat mengajarkan pembuat kebijakan di Kabupaten Jember tentang pentingnya peran kebijakan yang proaktif dan adaptif dalam mendorong inovasi lokal. Hasilnya juga diharapkan dapat mendorong pembentukan lingkungan yang mendukung inovasi berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis; Kebijakan Publik, Inovasi Daerah, Regulasi.

#### **ABSTRACT**

*Appropriate policies and regulations are needed to support regional innovation, which is an important component of sustainable development. Innovation that is flexible and suited to local needs can be achieved through the influence of policies in Jember Regency. The purpose of this research is to see how local policies help and encourage innovation in Jember Regency, with a particular emphasis on policies that support economic, social, and technological growth. The literature review method was used in this research. The study covers literature and policies related to regional innovation, as well as case studies on policy implementation in Jember. The study shows that policies implemented in*

*Jember greatly influence the success of creative initiatives, especially in terms of increasing local capacity and creating economic opportunities based on local wisdom. Strategic recommendations to improve the role of policies include inter-institutional coordination and increased community engagement. As a result, this research is expected to teach policymakers in Jember district about the importance of a proactive and adaptive policy role in encouraging local innovation. The results are also expected to encourage the establishment of an environment that supports sustainable innovation.*

*Keywords: Public Policy, Regional Innovation, Regulation.*

## PENDAHULUAN

Inovasi daerah merupakan aspek esensial dalam pengembangan dan peningkatan daya saing suatu wilayah, termasuk Kabupaten Jember. Inovasi ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Inovasi daerah yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih efisien serta berdaya saing, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi menjadi sangat penting dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di Jember.

Kebijakan dan regulasi memiliki peran fundamental sebagai dasar dalam proses inovasi daerah. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, inisiatif inovatif sering kali terhambat oleh ketidakpastian administratif dan minimnya dukungan sumber daya (Mahri et al., 2022). Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga mengakomodasi proses inovasi yang fleksibel, sehingga memudahkan implementasi inovasi yang sesuai dengan konteks lokal (Kementerian Keuangan RI, 2020). Dengan adanya kebijakan yang adaptif, inovasi dapat lebih mudah diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jember.

Namun, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengimplementasikan inovasi daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi pendukung yang bisa menjadi payung hukum bagi pelaksanaan inovasi. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap perubahan juga sering menjadi hambatan dalam mengadopsi inovasi baru (Kusuma, 2020). Tantangan ini perlu diatasi agar kebijakan inovasi dapat berjalan optimal, dan keberlanjutan inovasi daerah dapat diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran kebijakan dan regulasi dalam mendorong inovasi daerah di Kabupaten Jember. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung inovasi daerah secara efektif.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur yang mengkaji kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan inovasi daerah, khususnya di Jember. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan inovasi yang diperlukan untuk mendorong pengembangan daerah secara optimal (Cahyani & Amir, 2022).

Pentingnya peraturan yang mendorong inovasi tidak hanya perlu dirumuskan secara teoritis, namun juga bukti dari data kuantitatif dan penelitian empiris untuk mendukung argumen tersebut. Studi empiris memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara kebijakan inovasi dan hasil yang dicapai, seperti peningkatan efisiensi layanan publik, peningkatan kepuasan penduduk, dan peningkatan daya saing regional. Dengan menggunakan data ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang dikembangkan dan implementasi di lapangan serta memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang optimal. Oleh karena itu, penggunaan data empiris merupakan alat penting untuk mendorong inovasi daerah di Provinsi Jember. Data ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti dan memastikan bahwa peraturan yang dirancang benar-benar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebut kebijakan publik (Farida et al., 2023). Kebijakan publik sangat penting untuk mendorong inovasi yang membantu masyarakat setempat. (Siti Anisatun, 2014) mengatakan bahwa kebijakan yang baik dapat memimpin dan mendukung inovasi, terutama dengan membuat peraturan yang mendukungnya. Kebijakan yang buruk dapat menghambat inovasi karena birokrasi dan kekurangan dukungan sumber daya.

### 2. Inovasi Daerah dan Pentingnya Inovasi

Upaya untuk menciptakan solusi baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal, yang biasanya mencakup peningkatan layanan publik dan kapasitas ekonomi lokal, dikenal sebagai inovasi daerah (Wahyuni, 2019). Menurut (Saefuddin, 2015), regulasi yang kuat mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan yang aman dan aman sehingga berbagai pihak merasa didukung dalam mengembangkan ide-ide inovatif yang bermanfaat bagi daerah. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung inovasi sangat penting karena memberikan payung hukum bagi pelaksanaan inovasi. Karena ketidakpastian hukum dan kekurangan regulasi yang memadai, inovasi sering kali gagal mencapai potensi penuhnya.

### 3. Teori Difusi Inovasi oleh Everett Rogers (1962)

Teori yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat dapat menerima inovasi adalah teori difusi inovasi, yang diusulkan oleh Everett Rogers pada tahun 1962. Rogers menjelaskan dalam teorinya lima komponen utama yang memengaruhi adopsi inovasi: keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, ketercobaan, dan keterlihatan. Studi baru menunjukkan bahwa elemen-elemen ini sangat berpengaruh pada inovasi lokal, terutama di daerah seperti Kabupaten Jember (Samudra, 2018). Misalnya, masyarakat akan lebih mudah menerima inovasi yang menunjukkan keunggulan relatif dibandingkan metode tradisional.

### 4. Teori New Public Service oleh Denhardt dan Denhardt (2003)

(Denhardt & Denhardt, 2016) membuat teori baru tentang pelayanan publik yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus mendukung inovasi yang relevan dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dalam hal inovasi daerah (Fitriani et al., 2022). Teori ini menyatakan bahwa pemerintah berfungsi sebagai bukan hanya pelayan tetapi juga fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses inovasi. Dalam inovasi daerah, prinsip ini relevan karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan inovasi.

### 5. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara kebijakan dan inovasi di Kabupaten Jember dan di tempat lain. (Suhendra & Hartopo, 2022) menemukan bahwa kebijakan daerah yang fleksibel membantu berbagai kabupaten di Indonesia membuat pelayanan publik lebih inovatif. Selain itu, menekankan bahwa kebijakan Jember telah berhasil meningkatkan kualitas layanan dengan membuat inovasi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Ditemukan bahwa regulasi yang fleksibel sangat penting untuk mendorong inovasi di daerah dengan keterbatasan sumber daya dan masyarakat menentang inovasi dan kekurangan dukungan regulasi adalah masalah utama dalam menerapkan kebijakan inovasi. dapat didefinisikan sebagai model kebijakan publik berbasis teknologi yang menekankan pada efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Smart City menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang cepat

dan mudah diakses. Model ini sesuai dengan teori kebijakan publik yang menekankan betapa pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tuntutan teknologi kontemporer. Oleh karena itu, ia relevan dengan konteks inovasi Kabupaten Jember. (Maulana & Haerah, 2021)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan karena memungkinkan peneliti untuk memahami peran kebijakan dalam inovasi daerah melalui analisis berbagai literatur yang relevan Creswell, J. W. (2014). Tinjauan kepustakaan juga memudahkan pemetaan konsep dan hasil penelitian sebelumnya, yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan daerah dapat mendorong inovasi (Abdhul, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Kebijakan dalam Mendukung Inovasi

Kebijakan publik sangat penting untuk membangun dasar dan mendukung pelaksanaan inovasi di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam digitalisasi pelayanan publik adalah salah satu contoh nyata di mana kebijakan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. (Nanda Hidayati et al., 2023) menekankan bahwa kebijakan daerah yang pro-inovasi dapat meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi digital, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan dengan lebih mudah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kemajuan dalam digitalisasi pelayanan publik membutuhkan kebijakan yang jelas dan didukung oleh regulasi yang fleksibel untuk menangani perubahan teknologi.

### 2. Implikasi Teori Difusi Inovasi

Keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, ketercobaan, dan keterlihatan adalah beberapa komponen penting yang mempengaruhi penerimaan inovasi oleh masyarakat, dan teori difusi inovasi Everett Rogers membantu dalam hal ini. Keunggulan relatif, seperti manfaat yang dirasakan dari peningkatan layanan publik, memengaruhi tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat Jember. Kesesuaian antara inovasi dan prinsip lokal juga memengaruhi bagaimana masyarakat menerima inovasi dari pemerintah daerah.

### 3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Seringkali, pelaksanaan kebijakan menghadapi tantangan, terutama karena resistensi masyarakat terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan birokrasi yang kompleks. Disamping itu masyarakat sering menolak inovasi karena dianggap mengancam tradisi atau prinsip yang ada. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sadat, 2017), kekurangan infrastruktur dan keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan kebijakan inovatif di daerah. Selain itu, kompleksitas birokrasi memperlambat proses pengambilan keputusan, yang menghambat pelaksanaan inovasi di daerah.

### 4. Strategi untuk Meningkatkan Adopsi Inovasi

Kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang berguna untuk meningkatkan adopsi inovasi di wilayah tersebut. Pertama, diharapkan bahwa penggunaan inovasi dan manfaatnya dapat dikurangi melalui pelatihan masyarakat (Triwijayati et al., 2023). Kedua, lebih banyak orang dapat berkontribusi pada inovasi lokal dengan memberikan insentif kepada inovator lokal. Ketiga, pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat lingkungan inovatif yang

inklusif. Inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dapat dikembangkan dengan bekerja sama dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

## 5. Analisis Berdasarkan Teori New Public Service

Teori *New Public Service* yang diusulkan oleh (Denhardt & Denhardt, 2016) menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan inovasi dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan. Ditemukan bahwa pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik mendorong masyarakat untuk menerima inovasi karena mereka merasa bahwa kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kebutuhan mereka.

Pada penelitian terdahulu (Maulana & Haerah, 2021) Konsep *Smart City* dapat digunakan sebagai contoh kebijakan berbasis teknologi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah. *Smart City* memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dan menyediakan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien bagi masyarakat. Pembangunannya di beberapa daerah telah terbukti mempercepat pemecahan masalah dalam penyediaan layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan membuat masyarakat lebih mudah. Studi ini menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya tentang kebijakan inovasi di daerah. di kabupaten lain menunjukkan bahwa penerapan kebijakan inovasi yang proaktif memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, keterlibatan masyarakat dan teknologi dalam setiap fase pelaksanaan kebijakan inovasi di Jember sangat penting untuk keberhasilannya. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip dasar kebijakan inovasi dapat diterapkan secara luas, implementasinya harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan lokal.

Konsep *Agile Governance* sangat penting untuk membahas peran kebijakan dalam mendukung inovasi, teori difusi inovasi, hambatan implementasi kebijakan, strategi untuk memperkenalkan inovasi, dan analisis berbasis teori mengenai layanan publik baru. Tata kelola yang tangkas memiliki kemampuan merespons perubahan dengan cepat, mendukung langkah-langkah inovatif seperti digitalisasi layanan publik, dan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. (Kurniawan et al., 2021) Dalam konteks teori difusi inovasi, prinsip tangkas memungkinkan adaptasi terhadap keunggulan relatif dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal, sehingga memfasilitasi penerimaan inovasi oleh masyarakat. Selain itu, tata kelola yang agile dapat mengatasi hambatan seperti penolakan terhadap perubahan, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan sumber daya melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel. Strategi adopsi inovasi seperti pelatihan masyarakat, pemberian insentif kepada inovator lokal, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sejalan dengan pendekatan tangkas yang mendorong kolaborasi inklusif. Terakhir, agile governance dapat meningkatkan layanan publik baru dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, dan memastikan bahwa kebijakan inovatif merespons kebutuhan dan budaya lokal. Oleh karena itu, konsep ini merupakan pendekatan strategis untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan di era digital.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Studi ini menyoroti pentingnya peran kebijakan dan regulasi dalam mendorong inovasi di Kabupaten Jember. Kebijakan yang adaptif dan inklusif dapat memperkuat inovasi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan di Jember harus lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan lokal, termasuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, menyediakan insentif

bagi pelaku inovasi, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kualitatif langsung di lapangan atau studi kasus komparatif di wilayah lain agar dapat memahami dinamika inovasi daerah secara lebih mendalam dan kontekstual. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong inovasi dan meningkatkan pelayanan publik adalah konsep Smart City. Implementasi Smart City menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung kebijakan yang proaktif dan inovatif sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, Smart City dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. Selain itu, konsep tata kelola yang tangkas juga relevan dalam konteks ini dan harus diterapkan. Tata kelola yang tangkas memungkinkan pemerintah merespons perubahan dengan cepat, mengurangi hambatan birokrasi, dan mengembangkan kebijakan yang fleksibel dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, namun juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### Saran

Artikel ini menggunakan studi kasus di Provinsi Jember untuk menyoroti pentingnya kebijakan dan peraturan dalam mendukung inovasi daerah. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang adaptif dan berbasis lokal dapat meningkatkan inovasi terkait kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Kendala seperti resistensi masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya merupakan tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan inovatif. Studi ini menawarkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mengembangkan insentif bagi pelaku inovasi. Konsep *Smart City* diusulkan sebagai pendekatan kebijakan berbasis teknologi terkait peningkatan pelayanan publik di Jember. Untuk penelitian lebih lanjut, penelitian ini menyarankan pendekatan kualitatif atau studi komparatif untuk lebih memahami dinamika inovasi regional dan mengeksplorasi implementasi inovasi yang lebih spesifik konteks. Artikel ini membantu para pengambil kebijakan mendapatkan wawasan tentang pentingnya peran regulasi aktif dalam mendorong inovasi regional. Dengan memadukan implementasi Smart City dan Agile Governance, Kabupaten Jember memiliki potensi untuk menjadi contoh sukses dalam mengembangkan inovasi kebijakan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd hul, Y. (2021). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode - Deepublish Store. In *Deepublish*.
- Cahyani, I. D., & Amir, M. T. (2022). Analisis Strategi Inovasi Pelayanan & Inovasi Kebijakan Pada Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) DKI Jakarta Untuk Mengawal Peningkatan Produktivitas & Daya Saing Provinsi DKI Jakarta. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5671>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2016). The new public service: Serving, not steering. In *The New Public Service: Serving, Not Steering*. <https://doi.org/10.4324/9781315289496>
- Farida, U., Kholidinna Qasabandiyah, M., & Ansar, A. (2023). Understanding Public Policy in Regional Financial Management: A Narrative Approach to Analyzing Policy Implementation and Its Impact on Local Development. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.647>
- Fitriani, N. I., Fitri, S. A., Marlin, K., & Melia, Y. (2022). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA RSUD SUNGAI RUMBAI. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 2(1). <https://doi.org/10.31958/jaksya.v2i1.5604>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Berfikir Kreatif Dan Inovatif Dalam Pelayanan Publik*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). Agile Governance Sebagai Bentuk

- Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah. *Danar Ilham Kurniawan, Akbar Maulana, Itok Wicaksono.*
- Kusuma, H. B. (2020). Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Smart City Menuju Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0.*
- Mahri, A. J. W., Rais Muhamad Falah, & Aas Nurasyiah. (2022). Regional Sukuk Issuance Strategy for West Java Province Infrastructure Financing. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6). <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp772-786>
- Maulana, A., & Haerah, K. (2021). Smart City Development Innovation Strategy and Challenges for the Government of Jember Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012008>
- Nanda Hidayati, Esti Handayani, & Sulistyowati, N. W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6). <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.451>
- Sadat, D. A. (2017). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. *Journal of Management Review*, 1(2). <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i2.699>
- Saefuddin, A. (2015). Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah dan Pengembangan Blue Economy. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 1(3). <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i3.10289>
- Samudra, A. (2018). Difusi Inovasi E-Learning (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Inovasi E-learning SMA Batik 1 Surakarta). *Skripsi.*
- Siti Anisatun. (2014). Landasan Teori Kebijakan Publik. *Convention Center Di Kota Tegal.*
- Suhendra, A., & Hartopo, A. (2022). Inovasi Wisata: Upaya Pemerintah Kota Sawahlunto Dalam Pengembangan Daya Saing dan Destinasi Wisata baru. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah*, 1(1). <https://doi.org/10.56585/jkdid.v1i1.4>
- Triwijayati, A., Luciany, Y. P., Novita, Y., Sintesa, N., & Zahrudin, A. (2023). Strategi Inovasi Bisnis untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Organisasi di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03). <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.564>
- Wahyuni, F. (2019). Inovasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Teknologi Melalui Mobile JKN di Kantor Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 3(2).